

Dinamika inflasi di Indonesia terhadap daya beli masyarakat dalam perspektif ekonomi makro

Fera Putri Utama

Program Studi Akuntansi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: *feraputriutama335@gmail.com

Kata Kunci:

5 kata kunci; Inflasi, Daya Beli, Ekonomi Makro, Faktor Inflasi, Dampak Inflasi

Keywords:

Inflation, Purchasing Power, Macroeconomics,

ABSTRAK

Kesejahteraan ekonomi suatu negara sangat dipengaruhi oleh tingkat inflasi yang rendah dan stabil, yang mencerminkan kondisi ekonomi yang sehat dan stabil. Ketetapan harga yang tercipta dari inflasi yang terkendali mampu membangun rasa percaya di kalangan konsumen maupun pelaku usaha. Sebaliknya, ketika inflasi meningkat secara drastis atau berubah-ubah tanpa kendali, berbagai tantangan serius pun muncul. Inflasi yang tinggi dapat memicu lonjakan harga yang sulit diprediksi. Negara-negara berkembang umumnya rentan terhadap terjadinya inflasi. Inflasi yang berada di bawah angka 3% masih dianggap dalam batas wajar

bagi suatu negara. Namun, apabila inflasi meningkat tajam dan tidak terkendali, hal tersebut mencerminkan ketidakstabilan ekonomi. Kondisi ini ditandai dengan kenaikan harga barang dan jasa secara menyeluruh dan berkelanjutan, yang pada akhirnya dapat memperburuk tingkat kemiskinan dan meningkatkan angka pengangguran di negara tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bahwa daya beli masyarakat menurun karena salah satu faktor yaitu terjadinya inflasi.

ABSTRACT

The economic prosperity of a country is greatly influenced by low and stable inflation rates, which reflect a healthy and stable economic condition. Price stability resulting from controlled inflation helps build confidence among both consumers and businesses. Conversely, when inflation rises sharply or becomes erratic and uncontrollable, it presents serious challenges. High inflation can trigger unpredictable price increases. Developing countries are generally more vulnerable to inflation. An inflation rate below 3% is still considered within a normal range for a country. However, if inflation rises significantly and becomes unstable, it indicates economic instability. This situation is marked by a general and continuous increase in the prices of goods and services, which can ultimately worsen poverty levels and increase unemployment rates. The aim of this study is to determine that one of the factors contributing to the decline in people's purchasing power is inflation.

Pendahuluan

Inflasi merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kestabilan ekonomi suatu negara. Sebagai fenomena ekonomi yang ditandai dengan kenaikan harga secara umum dan berkelanjutan, inflasi memiliki dampak langsung terhadap daya beli masyarakat. Di Indonesia, dinamika inflasi kerap menjadi perhatian utama dalam perumusan kebijakan ekonomi, mengingat pengaruhnya yang luas terhadap kesejahteraan masyarakat, kestabilan harga, serta pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Dalam konteks ekonomi makro, inflasi tidak hanya mencerminkan tekanan terhadap harga barang dan jasa, tetapi juga menjadi cerminan dari efektivitas kebijakan moneter dan fiskal yang diterapkan oleh pemerintah dan otoritas keuangan. Tingkat



inflasi yang tidak terkendali dapat menurunkan nilai riil pendapatan, menggerus konsumsi rumah tangga, serta menimbulkan ketidakpastian dalam aktivitas bisnis. Sebaliknya, inflasi yang stabil dan berada dalam batas wajar dapat menciptakan iklim ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan. Indonesia sebagai negara berkembang tidak lepas dari tantangan inflasi yang bersifat fluktuatif. Kenaikan harga kebutuhan pokok, energi, dan biaya produksi seringkali menjadi faktor pemicu inflasi yang berdampak pada turunnya kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, pemahaman mengenai dinamika inflasi dan dampaknya terhadap daya beli masyarakat sangat penting untuk mendukung formulasi kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran.

Dalam beberapa tahun terakhir, banyak orang merasakan adanya lonjakan harga pada barang dan jasa kebutuhan dasar, yang berdampak pada meningkatnya beban ekonomi bagi sebagian besar masyarakat. Reaksi publik terhadap rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) atau tarif dasar Listrik yang sering diwujudkan melalui aksi unjuk rasa menunjukkan kekhawatiran terhadap kenaikan harga yang dianggap memberatkan. Kenaikan harga kebutuhan pokok yang terus-menerus ini umumnya dikaitkan dengan fenomena ekonomi yang dikenal sebagai inflasi. Salah satu faktor utama yang mendorong terjadinya inflasi adalah ketidakseimbangan antara permintaan dan ketersediaan barang atau jasa. Ketika permintaan meningkat dan konsumen rela membayar lebih demi memperoleh produk atau layanan tertentu, produsen biasanya merespons dengan menaikkan harga guna memaksimalkan keuntungan. Namun, apabila pasokan tidak mampu mengimbangi lonjakan permintaan tersebut, hal ini dapat memicu kenaikan harga secara luas di pasar.

Inflasi juga bisa disebabkan oleh meningkatnya biaya produksi, misalnya akibat naiknya upah tenaga kerja atau harga bahan baku. Ketika biaya produksi mengalami kenaikan, perusahaan cenderung membebankan tambahan biaya tersebut kepada konsumen dengan menaikkan harga jual. Selain faktor internal, inflasi turut dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti perubahan harga minyak dunia, fluktuasi nilai tukar mata uang, serta kondisi politik yang tidak stabil di suatu negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perubahan tingkat inflasi di Indonesia memengaruhi daya beli masyarakat dalam kerangka ekonomi makro. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan hubungan yang jelas antara inflasi dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat, serta memberikan rekomendasi yang relevan bagi pengambil kebijakan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. (Nurkhanifah 2023)

Pembahasan

Konsep Inflasi dan Daya Beli dalam Ekonomi Makro

Inflasi

Inflasi merupakan suatu kondisi di mana terjadi peningkatan harga secara umum dan berlangsung secara berkelanjutan. Kenaikan harga yang hanya terjadi pada satu atau dua jenis barang saja tidak dapat dikategorikan sebagai inflasi, kecuali jika kenaikan tersebut berdampak pada kenaikan harga barang-barang lainnya secara luas. Inflasi terjadi karena ketidakseimbangan antara program penyediaan komoditas yang

mencakup produksi, penetapan harga, pencetakan uang, dan aspek lainnya dengan tingkat pendapatan masyarakat. Menurut penulis, inflasi adalah fenomena naiknya harga-harga komoditas yang dipicu oleh berbagai faktor yang kemudian mendorong kenaikan harga barang secara keseluruhan. Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Artinya, ketika inflasi terjadi, daya beli uang menurun karena jumlah barang dan jasa yang bisa dibeli dengan jumlah uang yang sama menjadi lebih sedikit.

Dalam ekonomi, inflasi sering diukur menggunakan indeks harga, seperti Indeks Harga Konsumen (IHK). Inflasi yang moderat dianggap normal dan bahkan diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi, tetapi inflasi yang terlalu tinggi atau tidak terkendali dapat merugikan masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pergerakan harga komoditas global memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap berbagai sektor ekonomi. Salah satu temuan penting menunjukkan bahwa variabilitas harga komoditas dunia tidak semata-mata ditentukan oleh faktor ekonomi seperti keseimbangan antara permintaan dan penawaran global, tetapi juga dipengaruhi oleh aspek geopolitik, perubahan iklim, serta peristiwa global yang bersifat tidak terduga.

Dalam sektor pertanian, pergeseran harga komoditas global dapat menimbulkan dampak yang bersifat dua sisi. Di satu sisi, kenaikan harga komoditas dapat memberikan keuntungan bagi para petani, namun di sisi lain, mereka juga menghadapi risiko akibat ketidakstabilan harga yang terjadi secara mendadak. Untuk mengurangi dampak dari ketidakpastian tersebut, penerapan teknologi pertanian yang modern serta kebijakan perlindungan terhadap petani menjadi langkah strategis yang dapat diambil. Di sisi lain, sektor industri dan manufaktur juga merasakan dampak dari perubahan harga komoditas global, terutama terkait dengan peningkatan biaya bahan baku. Untuk menghadapi tantangan ini, perusahaan perlu mengelola rantai pasokan mereka secara efisien dan mempertimbangkan strategi diversifikasi guna meminimalkan risiko akibat fluktuasi harga komoditas. Dari sudut pandang sosial, pergeseran harga komoditas dapat memicu inflasi, yang kemudian berdampak pada daya beli masyarakat. Kelompok masyarakat yang tergolong ekonomi menengah ke bawah cenderung lebih terdampak oleh kondisi ini. Oleh karena itu, diperlukan penerapan kebijakan fiskal dan moneter yang tepat untuk menjaga kestabilan perekonomian sekaligus melindungi kesejahteraan masyarakat.

Dari perspektif kebijakan, hasil penelitian ini menekankan pentingnya kerja sama internasional dalam merespons fluktuasi harga komoditas global. Sinergi antarnegara dinilai dapat mengurangi ketidakpastian dan mendukung perumusan kebijakan yang lebih optimal. Di samping itu, penguatan diversifikasi ekonomi nasional serta peningkatan investasi di sektor-sektor yang lebih stabil juga direkomendasikan sebagai langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap komoditas tertentu. Dalam bidang pertanian, para responden mengungkapkan bahwa petani di Indonesia kerap menghadapi tantangan besar akibat dinamika harga komoditas. Walaupun kenaikan harga bisa membawa keuntungan, ketidakstabilan harga yang terjadi secara tiba-tiba seringkali mengganggu proses perencanaan dan produksi mereka. Oleh karena itu, isu keberlanjutan sektor pertanian serta perlindungan terhadap petani menjadi

aspek krusial yang perlu diperhatikan dalam merespons dampak perubahan harga komoditas di tingkat lokal. Di sisi lain, sektor industri dan manufaktur dalam negeri juga terdampak oleh fluktuasi harga komoditas, khususnya terkait dengan naiknya biaya bahan baku. Perusahaan-perusahaan di sektor ini perlu mengelola rantai pasokan dengan hati-hati serta menerapkan strategi diversifikasi untuk mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh ketidakpastian harga.

Dalam ranah sosial ekonomi, perubahan nilai tukar mata uang dapat berdampak pada daya beli masyarakat, terutama melalui pergeseran harga barang impor dan ekspor, serta perubahan nilai mata uang domestik terhadap mata uang asing. Kondisi ini menimbulkan tantangan ekonomi, khususnya bagi konsumen dan pelaku usaha yang sangat bergantung pada perdagangan internasional. Penelitian ini juga menekankan pentingnya penerapan kebijakan yang tepat dalam menghadapi fluktuasi nilai tukar. Salah satu pendekatan yang relevan bagi perusahaan adalah pengelolaan risiko menggunakan instrumen keuangan seperti derivatif mata uang. Di sisi lain, kebijakan moneter yang cermat termasuk langkah intervensi oleh bank sentral dapat berperan dalam menjaga kestabilan nilai tukar. Dalam skala global, kolaborasi internasional juga dinilai penting untuk menangani volatilitas nilai tukar, di mana koordinasi antarnegara mampu mengurangi ketidakpastian dan menciptakan iklim ekonomi dunia yang lebih stabil. (Maulana and Maulana 2024)

Inflasi di Indonesia Terhadap Daya Beli Masyarakat pada persepektif Ekonomi Makro

Dalam perspektif ekonomi makro, inflasi merupakan salah satu indikator penting yang mencerminkan stabilitas ekonomi suatu negara. Di Indonesia, inflasi memiliki dampak langsung terhadap daya beli masyarakat, yaitu kemampuan individu atau rumah tangga untuk membeli barang dan jasa dengan pendapatannya. Berikut penjelasan lebih rinci:

Penurunan Nilai Uang dan Daya Beli

Ketika inflasi meningkat, harga barang dan jasa secara umum naik. Jika kenaikan harga tidak diimbangi oleh peningkatan pendapatan masyarakat, maka daya beli akan menurun. Masyarakat tidak lagi mampu membeli jumlah barang atau jasa yang sama dengan jumlah uang yang sama seperti sebelumnya

Pengaruh Terhadap Konsumsi Rumah Tangga

Dalam ekonomi makro, konsumsi rumah tangga merupakan komponen utama dari Produk Domestik Bruto (PDB). Inflasi yang tinggi akan mengurangi konsumsi karena masyarakat menjadi lebih berhati-hati dalam membelanjakan uang. Ini bisa menekan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Dampak Terhadap Kelas Ekonomi Menengah dan Bawah

Golongan masyarakat berpenghasilan rendah paling merasakan dampaknya karena sebagian besar pendapatan mereka digunakan untuk kebutuhan pokok. Ketika harga kebutuhan pokok naik, mereka harus mengurangi konsumsi atau mencari alternatif yang lebih murah, yang menurunkan kualitas hidup mereka.

Peran Kebijakan Fiskal dan Moneter

Untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah dan Bank Indonesia menerapkan kebijakan makro, seperti:

- a) Kebijakan moneter: menaikkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi
- b) Subsidi dan bantuan sosial: untuk menjaga daya beli kelompok rentan
- c) Pengendalian harga komoditas pokok: melalui stabilisasi pasokan dan distribusi

Ketidakpastian Ekonomi dan Investasi

Inflasi yang tidak stabil menimbulkan ketidakpastian di pasar. Dunia usaha menjadi enggan berinvestasi atau ekspansi karena sulit memperkirakan biaya produksi dan permintaan. Hal ini pada akhirnya memperlambat pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, yang kembali berdampak pada daya beli. Peningkatan inflasi yang tidak diimbangi dengan pertumbuhan pendapatan masyarakat secara menyeluruh akan menyebabkan penurunan daya beli. Apabila kondisi ini berlangsung dalam jangka waktu yang lama, maka dapat memicu efek domino yang bersifat merugikan terhadap perekonomian nasional. Daya beli yang terus menurun dalam jangka panjang dapat menghambat kinerja dunia usaha, yang pada akhirnya mendorong perusahaan melakukan efisiensi, termasuk pengurangan tenaga kerja. Semakin besar jumlah masyarakat yang mengalami penurunan daya beli, maka semakin besar pula potensi dampak negatif terhadap stabilitas ekonomi negara. Untuk menangani persoalan inflasi secara efektif, diperlukan solusi yang berfokus pada penerapan manajemen risiko. Manajemen risiko merupakan metode yang terstruktur untuk memilih langkah yang paling tepat dalam menghadapi situasi yang penuh ketidakpastian. Melalui pendekatan ini, risiko dapat ditangani dan dikendalikan secara profesional (Suparyanto & Rosad, 2015, 2020). Selain itu, Badan Pusat Statistik (BPS) juga mengklasifikasikan inflasi ke dalam beberapa kategori melalui pendekatan disagregasi, guna mempermudah analisis terhadap jenis dan sumber inflasi. (Maimunah et al. 2024)

Daya beli

Daya beli (purchasing power) adalah kemampuan uang untuk membeli barang dan jasa. Dalam konteks ekonomi makro, daya beli masyarakat sangat erat kaitannya dengan pendapatan riil, yaitu pendapatan nominal yang disesuaikan dengan tingkat inflasi. Jika inflasi meningkat tanpa diikuti kenaikan pendapatan yang sepadan, maka daya beli riil masyarakat akan menurun.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Daya Beli

Pendapatan

Pendapatan merupakan faktor utama yang menentukan daya beli. Semakin tinggi pendapatan seseorang atau rumah tangga, maka semakin besar kemampuan mereka untuk membeli barang dan jasa. Contoh: Jika gaji seseorang naik dari Rp3 juta menjadi Rp5 juta per bulan, maka daya belinya juga meningkat, asalkan harga-harga barang tidak naik secara signifikan.

Harga Barang dan Jasa

Ketika harga barang dan jasa naik (inflasi), daya beli akan menurun jika pendapatan tidak ikut naik. Sebaliknya, jika harga turun (deflasi), daya beli akan meningkat.

Inflasi

Inflasi menggerus daya beli karena mengurangi jumlah barang dan jasa yang dapat dibeli dengan uang yang sama. Contoh: Jika inflasi tahunan adalah 5%, maka nilai riil dari Rp100.000 tahun depan setara dengan Rp95.000 dalam harga hari ini.

Tingkat Suku Bunga

Suku bunga mempengaruhi konsumsi dan investasi. Jika suku bunga tinggi, masyarakat cenderung menabung daripada membelanjakan uangnya, yang bisa menurunkan daya beli dalam jangka pendek.

Nilai Tukar Mata Uang

Untuk negara yang banyak mengimpor barang, nilai tukar mata uang juga berpengaruh. Jika mata uang domestik melemah, harga barang impor naik, dan ini bisa menurunkan daya beli masyarakat.

Mengapa Daya Beli Penting dalam Ekonomi?

Konsumsi dan Pertumbuhan Ekonomi

Daya beli mendorong konsumsi rumah tangga, yang merupakan komponen besar dalam Produk Domestik Bruto (PDB). Bila daya beli menurun, konsumsi pun berkurang, yang bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Ketimpangan Ekonomi

Ketika daya beli hanya meningkat pada kelompok pendapatan atas, maka kesenjangan sosial dan ekonomi bisa melebar. Ini berisiko menimbulkan instabilitas sosial.

Kesejahteraan Masyarakat

Daya beli yang baik memungkinkan masyarakat memenuhi kebutuhan pokok seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan secara layak. Jika daya beli rendah, maka kualitas hidup masyarakat juga akan terpengaruh. Contoh Nyata: Daya Beli dalam Kehidupan Sehari-Hari: Bayangkan seseorang yang setiap bulan mengalokasikan Rp500.000 untuk belanja kebutuhan pokok. Jika harga-harga naik 10% dalam setahun, sementara pendapatannya tidak berubah, maka jumlah barang yang bisa dibeli menjadi lebih sedikit. Dalam kasus ini, meskipun uang yang dimiliki tetap, daya belinya menurun. Pemerintah sering kali mencoba mengatasi penurunan daya beli melalui berbagai program:

- a) Pemberian subsidi energi dan pangan
- b) Bantuan langsung tunai (BLT)
- c) Penyesuaian upah minimum

Semua upaya tersebut bertujuan untuk menjaga agar masyarakat tetap mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Daya beli bukan hanya soal jumlah uang yang dimiliki, tetapi tentang seberapa jauh uang itu dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ia dipengaruhi oleh pendapatan, harga barang, inflasi, dan kebijakan ekonomi secara umum. Dalam konteks makroekonomi, daya beli sangat penting karena berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi, kestabilan sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Penting bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk memahami konsep daya beli agar dapat membuat keputusan ekonomi yang bijak dan berkelanjutan.

Dampak inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi

Kenaikan harga secara umum dapat berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi suatu negara karena terdapat keterkaitan erat antara inflasi dan aktivitas ekonomi. Ketika inflasi meningkat, daya beli masyarakat cenderung menurun, sehingga permintaan terhadap barang dan jasa melemah dan pertumbuhan ekonomi bisa terhambat. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi yang pesat juga berpotensi mendorong kenaikan harga melalui tekanan inflasi. Oleh sebab itu, kebijakan fiskal dan moneter perlu dirancang secara hati-hati untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan stabilitas harga agar laju inflasi tetap terkendali. Saat inflasi berada dalam batas yang terkendali, efisiensi perekonomian cenderung meningkat dan ketidakpastian bagi pelaku usaha dapat diminimalkan. Kondisi ini mendorong para pelaku bisnis untuk lebih percaya diri dalam merencanakan investasi jangka panjang dan meningkatkan kapasitas produksi secara konsisten. Selain itu, stabilitas harga menciptakan keyakinan bagi dunia usaha untuk melakukan ekspansi, yang pada gilirannya menciptakan iklim usaha yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan yang mampu menjaga inflasi tetap stabil menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Peningkatan aktivitas produksi berpotensi mendorong pertumbuhan nilai Produk Domestik Bruto (PDB), yang menjadi indikator utama pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, apabila inflasi melampaui ambang batas yang wajar atau terjadi lonjakan harga, dampaknya bisa merugikan perekonomian secara keseluruhan. Kenaikan harga yang tajam dapat menyulitkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok, sehingga berisiko menghambat tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang tepat dan terukur guna menjaga keseimbangan antara peningkatan output produksi, stabilitas harga, dan kesejahteraan rakyat. Kondisi tersebut dapat memicu ketidakpastian dalam sektor ekonomi, yang pada akhirnya mengancam prospek pertumbuhan ekonomi di masa depan.

Ketidakstabilan yang muncul akan menyulitkan upaya untuk mencapai kestabilan ekonomi yang menjadi prasyarat utama bagi pertumbuhan jangka panjang. Dampak lanjutan yang mungkin terjadi mencakup penurunan minat investasi serta melemahnya daya beli masyarakat, yang secara keseluruhan dapat memperlambat momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Inflasi yang rendah namun tidak stabil dapat menjadi hambatan bagi pertumbuhan ekonomi karena menciptakan ketidakpastian di pasar. Ketidakpastian ini membuat para pelaku usaha enggan untuk meningkatkan kapasitas produksinya. Akibatnya, laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dan perkembangan ekonomi suatu negara bisa melambat. Sebaliknya, tingkat inflasi yang

moderat dan stabil justru dapat mendorong pelaku usaha untuk berinvestasi lebih aktif, sehingga memperkuat pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh. (Maimunah et al. 2024)

Tren Inflasi di Indonesia: Fakta dan Data

Berdasarkan data BPS (2024), tingkat inflasi Indonesia dalam dekade terakhir berfluktuasi antara 2% hingga 6% per tahun. Beberapa faktor penyebabnya antara lain:

- a) Kenaikan harga bahan pangan (volatile food)
- b) Kenaikan harga energi (administered prices)
- c) Gangguan rantai pasok akibat pandemi dan konflik global
- d) Fluktuasi nilai tukar rupiah

Inflasi tertinggi dalam 10 tahun terakhir tercatat pada tahun 2022, yakni sebesar 5,51% (yoy), dipicu oleh penyesuaian harga BBM bersubsidi dan lonjakan harga pangan global.

Pengaruh Inflasi terhadap Daya Beli Masyarakat

Penurunan Konsumsi Rumah Tangga

Inflasi yang tinggi menyebabkan barang kebutuhan pokok menjadi lebih mahal. Bila pendapatan masyarakat tidak ikut naik, mereka akan mengurangi konsumsi, terutama pada kelompok menengah ke bawah.

Pergeseran Pola Konsumsi

Masyarakat cenderung mengalihkan belanja dari barang non-esensial ke barang kebutuhan pokok. Hal ini dapat berdampak pada sektor usaha yang memproduksi barang konsumsi sekunder dan tersier.

Ketimpangan Ekonomi

Inflasi berdampak lebih besar pada kelompok miskin, karena proporsi pengeluaran mereka untuk makanan dan kebutuhan dasar jauh lebih tinggi dibanding kelompok kaya. Dengan kata lain, inflasi bersifat regresif.

Implikasi terhadap Upah Riil

Bila upah nominal tidak disesuaikan dengan tingkat inflasi, maka upah riil menurun. Ini menyebabkan berkurangnya daya beli pekerja dan menurunnya kesejahteraan rumah tangga.

Kebijakan Pemerintah dalam Menjaga Daya Beli

Pemerintah Indonesia melalui koordinasi dengan Bank Indonesia (BI) menerapkan berbagai kebijakan makroekonomi untuk menjaga inflasi dan melindungi daya beli masyarakat:

- a) **Kebijakan moneter:** BI menaikkan atau menurunkan suku bunga acuan (BI Rate) untuk mengendalikan permintaan uang dan inflasi.
- b) **Kebijakan fiskal:** Pemerintah memberikan subsidi energi dan pangan, serta bantuan sosial (bansos) untuk mempertahankan konsumsi masyarakat miskin.

c) **Kebijakan pengendalian harga:** Operasi pasar murah, penetapan harga eceran tertinggi (HET), dan intervensi pasokan komoditas.

Studi Kasus: Inflasi dan Daya Beli pada 2022–2023

Pada tahun 2022, pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi, menyebabkan inflasi langsung melonjak. Dampaknya, banyak masyarakat melaporkan kesulitan membeli bahan pokok. Menurut Survei Konsumen BI (2023), indeks keyakinan konsumen menurun di kuartal IV 2022, terutama pada kelompok pengeluaran di bawah Rp2 juta per bulan. Sebagai respons, pemerintah mengeluarkan BLT BBM dan memperluas program Kartu Sembako untuk menjaga daya beli lapisan masyarakat rentan. Di sisi lain, BI menaikkan suku bunga acuan dari 3,5% menjadi 5,75% sepanjang 2022–2023 untuk meredam tekanan inflasi.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Dinamika inflasi di Indonesia memiliki hubungan erat dengan daya beli masyarakat. Dalam perspektif ekonomi makro, inflasi yang tinggi dapat mengganggu kestabilan konsumsi rumah tangga, memperbesar ketimpangan, dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pengendalian inflasi merupakan bagian integral dari strategi ekonomi nasional untuk menjaga kesejahteraan rakyat. Pemerintah dan Bank Indonesia perlu terus berkolaborasi dalam mengelola inflasi melalui kebijakan moneter, fiskal, dan stabilisasi harga untuk memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga, terutama bagi kelompok rentan. Artikel ini menguraikan hubungan erat antara inflasi dan daya beli dalam konteks ekonomi makro, khususnya di Indonesia. Inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan berkelanjutan, yang apabila tidak diimbangi dengan kenaikan pendapatan masyarakat, akan mengurangi daya beli. Daya beli sendiri adalah indikator penting yang mencerminkan kemampuan masyarakat dalam mengakses kebutuhan hidup, dan berkontribusi besar terhadap konsumsi rumah tangga, yang menjadi komponen utama dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB).

Fluktuasi inflasi berdampak langsung pada berbagai sektor, seperti pertanian, industri, dan kesejahteraan sosial masyarakat. Inflasi yang tinggi maupun inflasi yang rendah tapi tidak stabil menimbulkan ketidakpastian, mengurangi konsumsi, serta melemahkan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Kelompok masyarakat berpenghasilan rendah merupakan pihak yang paling terdampak akibat inflasi, karena proporsi pengeluaran mereka terhadap kebutuhan pokok sangat tinggi. Dalam hal ini, peran kebijakan fiskal dan moneter menjadi sangat penting. Pemerintah dan Bank Indonesia perlu bersinergi dalam menjaga kestabilan harga dan mendukung daya beli melalui subsidi, bantuan sosial, pengendalian harga, serta intervensi moneter. Upaya manajemen risiko serta kerja sama internasional juga menjadi langkah strategis dalam mengatasi dampak inflasi global dan menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Saran

- a) **Stabilisasi Harga Komoditas** Pemerintah perlu terus mengoptimalkan strategi stabilisasi harga, khususnya pada bahan pangan dan energi, melalui penguatan cadangan nasional, pengaturan distribusi, dan kerja sama dengan pelaku usaha
- b) **Peningkatan Produktivitas dan Teknologi** Sektor pertanian dan industri perlu diarahkan pada peningkatan produktivitas berbasis teknologi agar tidak terlalu rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global.
- c) **Penguatan Jaring Pengaman Sosial** Perluasan dan penyempurnaan program bantuan sosial (seperti BLT, subsidi sembako, dan subsidi energi) untuk melindungi daya beli masyarakat miskin saat terjadi tekanan inflasi.
- d) **Kebijakan Moneter yang Adaptif** Bank Indonesia harus tetap responsif terhadap dinamika inflasi domestik dan global dengan kebijakan suku bunga yang tepat untuk menjaga kestabilan nilai tukar dan harga.
- e) **Edukasi dan Literasi Ekonomi** Masyarakat perlu diberikan edukasi tentang pengelolaan keuangan dalam menghadapi inflasi, seperti pentingnya menabung, investasi aman, dan konsumsi yang bijak.
- f) **Diversifikasi Ekonomi dan Investasi Jangka Panjang** Pemerintah harus mendorong diversifikasi sektor ekonomi agar ketergantungan terhadap komoditas tertentu berkurang, sehingga ekonomi lebih tahan terhadap guncangan global.

Daftar pusaka

- Anas, W. M., Maulana, A. W., & Maulana, I. S. (2024). Dinamika inflasi di Indonesia terhadap daya beli masyarakat pada tinjauan ekonomi makro. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 2(2), 20-29.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2024). *Inflasi Tahun Kalender dan Tahunan Indonesia*. <https://www.bps.go.id>
- Bank Indonesia. (2023). *Laporan Perekonomian Indonesia 2022*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Sukirno, S. (2019). *Makroekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Mankiw, N. G. (2021). *Principles of Economics* (9th ed.). Boston: Cengage Learning.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *APBN Kita – Edisi Desember 2022*. <https://www.kemenkeu.go.id>
- Maimunah, Arikatun, JL Raya Telang, Kec Kamal, Kab Bangkalan, and Jawa Timur. 2024. "PT. Media Akademik Publisher DINAMIKA INFLASI DI INDONESIA: ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB INFLASI DAN DAMPAK TERHADAP PEREKONOMIAN." *Jma* 2 (6): 3031–5220.
- Maulana, Anas Wahid, and Isnan Sayid Maulana. 2024. "Dinamika Inflasi Di Indonesia Terhadap Daya Beli Masyarakat Pada Tinjauan Ekonomi Makro." *Moneter: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan* 2 (2): 20–29. <https://doi.org/10.61132/moneter.v2i2.437>.
- Nurkhanifah, E N. 2023. "Analisis Dampak Menurunnya Daya Beli Di Lingkungan Masyarakat Indonesia Akibat Inflasi." *Sahmiyya* 2 (1): 241.